BAB II

STUDI PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Administrasi Pembangunan

Adnan & Hamim (2012) mengemukakan bahwa Administrasi pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan secara sadar, terencana, dan berkesinambungan guna mengubah kondisi masyarakat ke arah yang lebih baik. Proses ini mencakup seluruh aspek kehidupan, baik fisik maupun nonfisik, material maupun spiritual, serta meliputi berbagai bidang seperti ideologi, hukum, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan ketahanan masyarakat atau ketahanan nasional suatu bangsa.

Suarlin (2024) mengatakan Administrasi pembangunan adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur dan menjalankan berbagai usaha agar rencana pembangunan bisa tercapai, dengan tujuan membawa perubahan ke arah yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai bidang.

Paul Meadows dalam bukunya *Motivation for Change and Development Administration*, mendefinisikan administrasi pembangunan dapat dipahami sebagai proses pengelolaan dalam aspek ekonomi dan transformasi sosial yang diwujudkan melalui penetapan kebijakan publik (Anggara & Sumantri, 2016).

Mustopadidjaja dalam Anggara & Sumantri, (2016) mengemukakan administrasi pembangunan adalah ilmu dan

keterampilan dalam mengelola sistem administrasi negara agar dapat menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan baik, efisien, dan efektif.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan adalah proses yang dilakukan secara sadar, terencana, dan berkelanjutan oleh pemerintah untuk mengelola berbagai kegiatan pembangunan guna membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Proses ini mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik fisik maupun nonfisik, serta bidang ideologi, hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat ketahanan nasional. Administrasi pembangunan juga melibatkan penetapan kebijakan publik yang mendorong transformasi sosial dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, administrasi pembangunan memerlukan ilmu dan keterampilan dalam mengelola sistem pemerintahan secara efisien dan efektif. Dengan demikian, administrasi pembangunan menjadi kunci penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang menyeluruh.

2. Konsep Kebijakan Publik

Menurut Ramdhani & Ramdhani, (2017) Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi.

Kebijakan merupakan hal yang penting dalam mencapai suatu tujuan pada organisasi. Kebijakan terdiri dari dua aspek yaitu kebijakan merupakan sebuah bentuk respon mengenai kejadian yang terjadi untuk menghasilkan harmonisasi dari pihak yang berkepentingan, menciptakan intensif atas perilaku pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas kerja bersama dan kebijakan merupakan sebuah praktik sosial (Desrinelti et al., 2021).

Carl Friedrich dalam Pramono (2020) Kebijakan publik adalah tindakan atau rencana yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam situasi tertentu. Kebijakan ini dibuat untuk mengatasi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Thomas R. Dye dalam Pramono (2020) mengatakan bahwa kebijakan publik pada dasarnya mengandung pengertian mengenai "*whatever government choose to do or no to do"*, artinya, segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah, baik untuk dilaksanakan maupun tidak. Apabila pemerintah memutuskan untuk bertindak, pasti ada tujuannya, karena kebijakan publik adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah.

Thomas R. Dye dalam Anggara (2014) mengemukakan jika pemerintah memutuskan untuk mengambil suatu tindakan, tentu ada tujuan yang ingin dicapai karena kebijakan publik merupakan bentuk tindakan pemerintah. Sebaliknya, jika pemerintah memilih untuk tidak

bertindak, keputusan tersebut juga merupakan bagian dari kebijakan publik yang memiliki tujuan tertentu.

Merilee S. Grindle dalam Yanuard et al. (2024) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (konteks implementasinya). Isi kebijakan mencakup kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuatan kebijakan, siapa pelaksana program dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara itu, konteks implementasinya mencakup kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa serta kepatuhan dan daya tanggap. Merilee S. Grindle menekankan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada isi kebijakan, tetapi juga pada dukungan dari kondisi sosial, politik, dan birokrasi setempat. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut sangat penting dalam memastikan kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan memberikan dampak yang diinginkan.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap keputusan pemerintah, baik tindakan maupun ketidaktindakan, mencerminkan strategi dalam mengelola kepentingan publik. Kebijakan publik harus didasarkan pada pertimbangan yang matang agar dapat memberikan manfaat yang optimal dan menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan. Pada akhirnya, kebijakan publik merupakan serangkaian langkah yang dirancang

untuk mencapai hasil yang diharapkan oleh masyarakat, serta memiliki legitimasi hukum karena dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam sistem pemerintahan.

3. Konsep Implementasi Kebijakan

Menurut Mokodompis et al., (2019) implementasi kebijakan merupakan bagian krusial dalam keseluruhan tahapan kebijakan publik. Studi mengenai implementasi kebijakan berfokus pada bagaimana kebijakan dijalankan dalam praktik. Pada pelaksanaannya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang tidak sederhana dan cenderung bersifat kompleks karena melibatkan berbagai aktor, kepentingan, serta kondisi sosial dan institusional yang saling memengaruhi.

Agindawati, (2019) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah proses untuk merealisasikan tujuan dan maksud yang mendasari pembentukan suatu kebijakan. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua metode yang dapat ditempuh, yaitu dengan melaksanakan kebijakan secara langsung atau melalui tahapan formulasi kebijakan lanjutan sebelum diterapkan.

Implementasi kebijakan merupakan upaya atau tindakan nyata dalam menjalankan keputusan yang telah ditetapkan pada tahap perumusan kebijakan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok tertentu seperti pihak pemerintah maupun swasta (Mahmud & Suandi, 2020).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan adalah proses yang penting dalam melaksanakan keputusan atau perintah dari kebijakan publik. Tujuannya adalah untuk mencapai sasaran kebijakan melalui tindakan nyata oleh berbagai pihak, dengan menggunakan sumber daya yang ada. Proses ini bisa dilakukan langsung atau melalui beberapa tahap tambahan, dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

4. Model-Model Implementasi Kebijakan

a. Model Mazmanian dan Sabatier

Model yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model Mazmanian dan Sabatier disebut Model Kerangka Analisis Implementasi (*A Framework for Implementation Analysis*). Mazmanian dan Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan dalam tiga variabel yaitu:

1) Variabel Independen

Kemudahan atau kesulitan dalam mengendalikan suatu masalah dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti indikator masalah itu sendiri, baik dari sisi teori maupun pelaksanaannya secara teknis. Selain itu, keberagaman objek yang terlibat juga turut memengaruhi. Penting pula untuk memahami perubahan seperti apa yang ingin dicapai.

Semua faktor ini saling berkaitan dan menentukan seberapa efektif suatu masalah dapat ditangani.

2) Variabel Intervening

Variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensı tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar dan variabel di luar kebijakan yang memengaruhi proses implementasi yang berkenan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

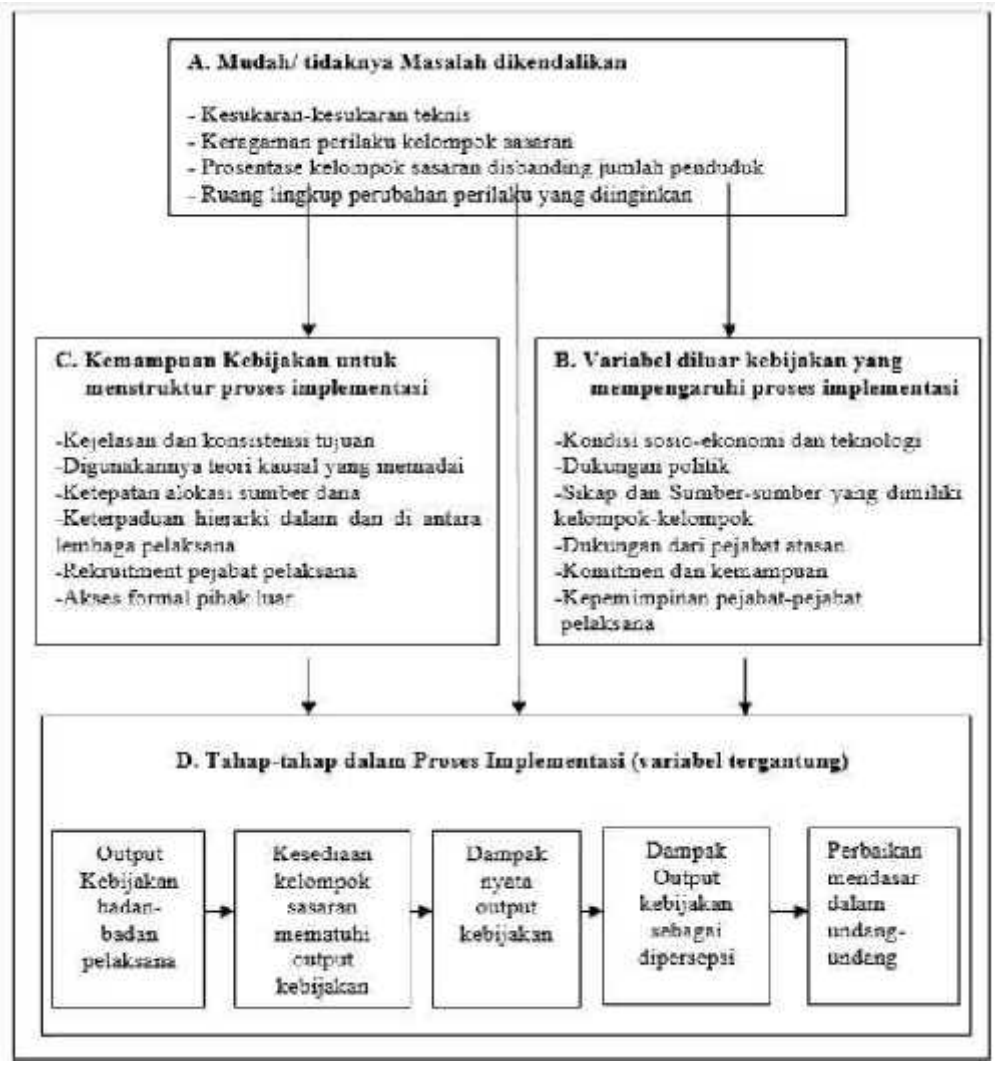
3) Variabel Dependen

Tahapan dalam proses implementasi meliputi lima langkah penting. Dimulai dari pemahaman lembaga atau instansi pelaksana yang ditunjukkan melalui penyusunan kebijakan operasional. Selanjutnya adalah kepatuhan dari pihak-pihak yang menjadi sasaran kebijakan, diikuti dengan munculnya hasil nyata dari pelaksanaan tersebut. Setelah itu, perlu dilihat sejauh mana hasil tersebut diterima oleh masyarakat, dan pada akhirnya bisa berujung pada revisi kebijakan

pelaksana maupun perubahan terhadap kebijakan utama secara menyeluruh.

Dalam keseluruhan proses implementasi, hubungan antara ketiga variabel ini sangat penting untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Variabel independen yang mencakup faktor-faktor seperti indikator masalah dan keragaman objek, berperan sebagai dasar untuk mengidentifikasi tantangan yang harus dihadapi. Variabel intervening menjadi penghubung yang menentukan keberhasilan implementasi dengan memastikan adanya dukungan struktural, alokasi sumber daya yang tepat, serta komitmen dari semua pihak yang terlibat. Terakhir, variabel dependen menggambarkan tahapan praktis dari implementasi kebijakan, yang mencakup penyusunan kebijakan, kepatuhan pelaksana, hasil nyata, serta penerimaan masyarakat yang pada akhirnya dapat mengarah pada revisi kebijakan yang lebih baik. Keterkaitan antara ketiga variabel ini menciptakan dinamika yang dapat memperbaiki atau mengubah arah kebijakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Nugroho, 2009).

Gambar 2
Model Implementasi Mazmanian dan Sabatier

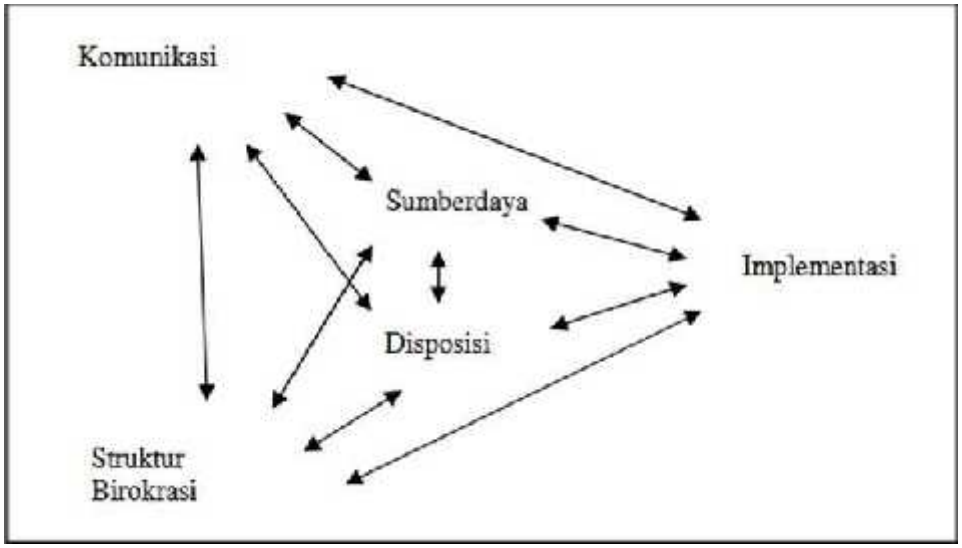


Sumber: P. Sabatier & Mazmanian, 1980

b. Model Edward III

Menurut George Edward III yang dikutip oleh (Widodo, 2010), terdapat empat faktor utama yang menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan suatu program atau kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi.

Gambar 3
Model Implementasi Edward III



Sumber: Edward III. 1377

1) Komunikasi

Edward III mengemukakan dalam (Winarno, 2005) bahwa elemen komunikasi memiliki tiga dimensi yaitu transmisi (*transmission*), kejelasan *(clarity*), dan konsistensi (*consistency*). Menurut pendapatnya bahwa dimensi transmisi berkaitan dengan keadaan di mana suatu kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran kebijakan, kelompok lain yang berkepentingan dan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dengan kebijakan. Seseorang yang menerapkan kebijakan harus tahu apa yang harus dilakukan agar implementasi kebijakan berjalan dengan baik. Sebelum kebijakan dan perintah yang telah diputuskan dapat diikuti, mereka harus diteruskan kepada pihak pemberi informasi yang tepat.

Selanjutnya, terkait dengan dimensi kejelasan (*clarity*), hal ini merujuk pada upaya menciptakan kondisi di mana kebijakan yang telah dirumuskan dapat ditransmisikan secara efektif kepada para pelaksana hingga mencapai kelompok sasaran, baik melalui penyampaian langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, instruksi atau petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami secara menyeluruh, tetapi juga disusun secara jelas dan tidak ambigu. Ketika instruksi tersebut disampaikan dengan tidak jelas, maka para pelaksana kebijakan akan mengalami kesulitan dalam memahami apa yang harus dipersiapkan, sehingga berisiko menghasilkan proses pelaksanaan yang tidak efektif dan tidak efisien.

Dimensi ketiga yang turut memengaruhi efektivitas komunikasi dalam implementasi kebijakan adalah konsistensi. Agar kebijakan dapat diterapkan secara optimal, maka seluruh perintah pelaksanaan harus disampaikan secara konsisten dan selaras. Ketidakkonsistenan dalam instruksi meskipun pada dasarnya jelas akan menciptakan kebingungan di kalangan pelaksana, sehingga mereka kesulitan dalam menjalankan tugas sesuai tujuan awal kebijakan. Lebih jauh, inkonsistensi dalam menafsirkan isi kebijakan dapat menimbulkan kesalahpahaman bahkan kekeliruan dalam pelaksanaannya oleh kelompok sasaran. Dalam situasi seperti ini, proses pencapaian tujuan kebijakan akan melambat, atau bahkan

gagal tercapai secara optimal. Akibatnya, efektivitas implementasi kebijakan menjadi sangat sulit direalisasikan, dan pemahaman masyarakat terhadap maksud serta arah kebijakan pun tidak dapat terbangun secara maksimal.

2) Sumber Daya

Meskipun suatu kebijakan telah disampaikan dengan akurat, jelas dan konsisten, implementasinya tetap tidak akan berjalan secara efektif dan efisien apabila para pelaksana kekurangan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sumber daya menjadi elemen krusial dalam proses implementasi kebijakan publik. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan sumber daya mencakup keberadaan sumber daya manusia yang kompeten serta memiliki kemampuan yang sesuai untuk melaksanakan tugasnya. Selain itu, tersedianya informasi yang memadai, kewenangan yang jelas, serta fasilitas pendukung yang memadai juga sangat diperlukan agar kebijakan yang tertuang dalam bentuk dokumen tertulis dapat diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.

a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam (Widodo, 2010) menyatakan bahwa "*probably the most essential resources in implementing policy is staff*".

Edward III dalam (Widodo, 2010) menambahkan "*no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective*".

b) Sumber Daya Anggaran

Menurut Edward III, keterbatasan anggaran dan minimnya insentif bagi pelaksana kebijakan berdampak pada rendahnya kualitas layanan yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan program. Edward III dalam (Widodo, 2010) menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya, khususnya anggaran, dapat memengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan. Akibatnya, pelaksanaan program tidak berjalan secara optimal dan berdampak pada terbatasnya efektivitas perilaku dalam implementasi kebijakan.

c) Sumber Daya Peralatan

Edward III dalam (Widodo, 2010) mengungkapkan bahwa sumber daya berupa peralatan mencakup sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan operasional, seperti bangunan, lahan, dan fasilitas lainnya. Semua elemen tersebut berperan penting dalam mendukung kelancaran pelayanan saat kebijakan diimplementasikan.

d) Sumber Daya Kewenangan

Menurut Edward III dalam (Widodo, 2010), kewenangan yang memadai dapat mendorong perkembangan suatu lembaga dalam melaksanakan kebijakan. Kewenangan ini penting dimiliki untuk menghadapi berbagai permasalahan serta memastikan keputusan yang diambil dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

3) Disposisi

Menurut Edward III dalam (Widodo, 2010), disposisi merujuk pada kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaksana kebijakan untuk menjalankan kebijakan tersebut dengan sungguh-sungguh, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Edward III melihat disposisi sebagai sikap atau kesiapan mental para implementor dalam melaksanakan kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada pengetahuan dan kemampuan pelaksana, tetapi juga ditentukan oleh sejauh mana mereka memiliki kemauan untuk benar-benar melaksanakannya.

Sikap atau disposisi pelaksana dapat menimbulkan berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan apabila tidak dijalankan dengan baik oleh para pelaksana. Oleh karena itu, penting bagi pelaksana kebijakan untuk memiliki komitmen terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, terutama dalam kaitannya dengan pelayanan

kepada masyarakat. Pemberian insentif dianggap sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan terkait sikap pelaksana melalui pendekatan manipulasi insentif. Hal ini menunjukkan bahwa individu sering kali bertindak berdasarkan kepentingan pribadi. Dengan demikian, manipulasi insentif oleh pihak-pihak tertentu dapat menjadi faktor pendorong yang memengaruhi perilaku pelaksana dalam menjalankan kebijakan maupun dalam mencapai tujuan bersama.

4) Struktur Birokrasi

Ripley dan Franklin dalam (Winarno, 2005) mengemukakan enam ciri khas birokrasi berdasarkan hasil pengamatan mereka terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

a) Birokrasi berfungsi sebagai alat untuk menangani kepentingan publik.
b) Birokrasi memiliki berbagai tingkat kepentingan atau hierarki.
c) Birokrasi dibentuk dengan beragam tujuan yang berbeda.
d) Peran birokrasi dijalankan dalam konteks lingkungan yang luas dan kompleks.
e) Birokrasi memiliki dorongan untuk terus bertahan dan beroperasi, sehingga sering disebut sulit untuk dibubarkan.

f) Birokrasi pada umumnya tidak bersifat netral sepenuhnya, namun juga tidak sepenuhnya dikendalikan oleh pihak eksternal.

Meskipun sumber daya dan para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki niat untuk melaksanakannya, implementasi kebijakan tetap dapat mengalami hambatan akibat tidak efisiennya struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti bentuk organisasi internal dan hubungan organisasi dengan pihak eksternal.

Menurut Edward III dalam (Winarno, 2005) menyebutkan dua karakteristik utama birokrasi, yaitu *Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Menurut (Winarno, 2005), SOP muncul sebagai respons terhadap kebutuhan internal akan kepastian waktu, alokasi sumber daya, dan standarisasi dalam organisasi yang besar dan kompleks. Sementara itu, Edward III dalam (Widodo, 2010) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh seberapa jelas standar operasional, yang meliputi sistem, mekanisme, prosedur pelaksanaan, pembagian tugas pokok, fungsi dan wewenang, serta tanggung jawab antar pelaksana. Selain itu, ketidakharmonisan hubungan antar organisasi pelaksana juga menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

c. Model Marilee S. Grindle

Menurut Marilee S. Grindle bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel yang fundamental yaitu dari isi kebijakan dan konteks implementasinya, ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan: Ini mencakup semua pihak yang terpengaruh oleh kebijakan, seperti kelompok-kelompok masyarakat, sektor bisnis, atau pemerintah.
2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan: Mengacu pada berbagai keuntungan yang diinginkan dari kebijakan tersebut, seperti manfaat di bidang ekonomi, sosial, lingkungan, maupun politik.
3) Derajat perubahan yang diinginkan: Menunjukkan tingkat perubahan yang diharapkan dari kebijakan terhadap situasi yang ada atau sejauh mana kebijakan tersebut ditujukan untuk mencapai sasaran tertentu.
4) Kedudukan pembuatan kebijakan: Mengarah pada pihak-pihak yang terlibat dalam merumuskan kebijakan

serta sejauh mana mereka memiliki otoritas dan pengaruh dalam proses tersebut

5) (Siapa) pelaksana program: Berkaitan dengan para pihak yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan serta siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaannya
6) Sumber daya yang dikerahkan: Mengacu pada berbagai sumber daya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan dan penerapan kebijakan.

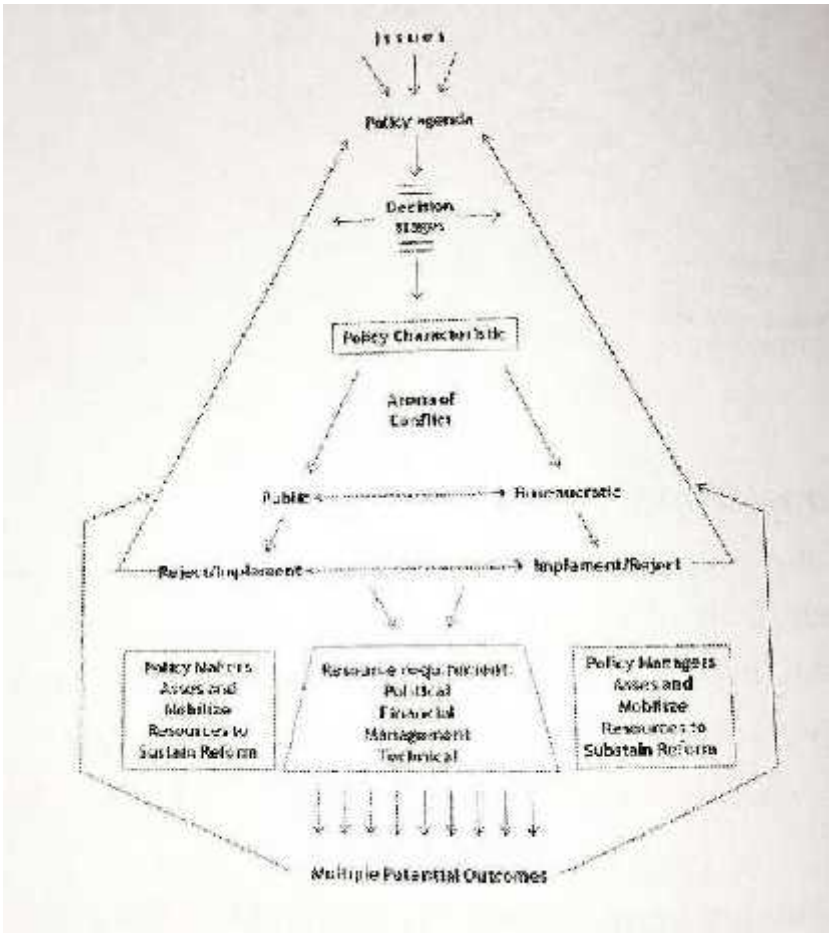
Sementara itu, konteks implementasinya adalah

1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat: Meliputi identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, kekuatan yang mereka miliki, kepentingan masing-masing, serta pendekatan yang mereka gunakan dalam proses implementasi.
2) Karakteristik lembaga dan penguasa: Ini mencakup analisis terhadap ciri-ciri lembaga-lembaga yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan, serta struktur kekuasaan yang ada di dalamnya.
3) Kepatuhan dan daya tanggap: Mengacu pada tingkat kepatuhan penerima kebijakan terhadap peraturan yang ada serta sejauh mana pemerintah merespons kebutuhan dan masukan dari mereka.

Model Grindle memiliki keunikan melalui pendekatan yang menyeluruh terhadap konteks kebijakan. Hal ini terutama

terlihat pada perhatiannya terhadap peran para pelaksana kebijakan, pihak penerima manfaat, potensi konflik antaraktor dalam proses implementasi, serta berbagai kondisi sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut (Nugroho, 2009).

Gambar 4
Model Implementasi Marilee S. Grindle



Sumber : Marilee S. Grindle (1980)

5. Kebijakan Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah adalah sisa material yang sudah tidak dibutuhkan lagi setelah suatu proses selesai dilakukan (Yudiyanto et al., 2019). (Dewi et al., 2024) menyatakan sampah adalah hasil dari berbagai kegiatan manusia, baik di lingkungan rumah tangga maupun industri, yang berupa sisa-sisa material yang tidak lagi diinginkan atau tidak memiliki nilai guna. Menurut *World Health Organization* (WHO), sampah adalah barang yang tidak dipakai lagi, tidak disukai, atau dibuang karena berasal dari kegiatan manusia dan tidak muncul dengan sendirinya (Dobiki, 2018). Sedangkan Nandini et al. (2022) mendefinisikan bahwa sampah adalah sisa dari kegiatan manusia atau alam yang tidak dipakai lagi karena bagian pentingnya sudah diambil. Selama manusia terus melakukan aktivitas, sampah akan selalu ada dan tidak bisa dihindari. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sampah ialah sisa material berbentuk padat yang berasal dari kegiatan sehari-hari manusia maupun proses alam, yang tidak lagi digunakan, tidak diinginkan, atau telah kehilangan nilai gunanya. Sampah dapat timbul dari berbagai aktivitas, baik di lingkungan rumah tangga, industri, maupun kegiatan lainnya, dan biasanya dibuang karena bagian pentingnya sudah diambil atau tidak lagi memiliki manfaat. Karena merupakan hasil langsung dari aktivitas

manusia, keberadaan sampah tidak dapat dihindari selama manusia terus melakukan berbagai kegiatan. Seiring dengan meningkatnya volume dan keberagaman sampah, maka diperlukan upaya pengelolaan sampah yang efektif untuk meminimalkan dampak negatifnya.

Pengelolaan sampah merupakan salah satu bidang penting yang mendapat perhatian besar karena memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan lingkungan. Yudianto et al. (2021) mengemukakan bahwa Pengelolaan sampah adalah proses yang terencana, komprehensif, dan berkelanjutan yang mencakup pengurangan serta penanganan sampah. Pengelolaan yang tepat tidak hanya mampu mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Selain itu, pengelolaan sampah yang efisien dapat membantu mengurangi beban tempat pembuangan akhir serta memperpanjang usia pakainya. Agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara tepat dan sesuai aturan, penting untuk memahami jenis-jenis sampah yang diatur dalam perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, terdapat beberapa jenis sampah yang telah ditetapkan dalam peraturan ini, yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik.

a. Sampah Rumah Tangga merupakan sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
b. Sampah sejenis sampah rumah tangga merupakan sampah berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
c. Sampah spesifik yaitu jenis sampah yang memiliki karakteristik khusus dan memerlukan penanganan tersendiri. Jenis-jenis sampah spesifik ini antara lain adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, serta sampah yang timbul akibat bencana. Selain itu, sampah spesifik juga mencakup puing-puing dari bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan sampah yang timbul secara tidak periodik atau tidak teratur. Karena sifatnya yang berisiko dan tidak mudah ditangani, sampah spesifik memerlukan sistem pengelolaan yang lebih hati-hati dan sesuai dengan standar keselamatan lingkungan.

Pengelolaan sampah merupakan serangkaian proses yang dimulai dari pengurangan sampah di sumbernya hingga penanganan akhir. Tahapan ini mencakup pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir (Sahil et al., 2016). Pengurangan dilakukan dengan cara menghindari penggunaan

barang sekali pakai dan meminimalkan limbah yang dihasilkan. Selanjutnya, sampah perlu dipilah berdasarkan jenisnya, seperti organik dan anorganik, untuk memudahkan proses daur ulang atau pengolahan. Setelah itu, sampah dikumpulkan dan diangkut ke tempat pengolahan atau tempat pembuangan akhir. Pengolahan bisa dilakukan secara manual, biologis (seperti kompos), maupun dengan teknologi modern. Sementara itu, sampah yang tidak dapat diolah lagi akan dibuang ke tempat pembuangan akhir dengan prosedur yang ramah lingkungan. Jika tahapan ini dilakukan dengan benar, maka dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat ditekan secara signifikan.

Sebagai bentuk implementasi pengelolaan sampah yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Enrekang telah menetapkan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Enrekang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang terpadu dan berwawasan lingkungan, serta mendukung tercapainya target pengurangan dan penanganan sampah secara bertahap dan terukur. Dalam kebijakan tersebut, terdapat dua strategi utama, yakni strategi pengurangan dan strategi penanganan sampah. Strategi pengurangan diarahkan untuk membatasi timbulan sampah melalui upaya pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah, yang

sejalan dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Sedangkan strategi penanganan meliputi kegiatan pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dengan cara yang efisien dan ramah lingkungan. Di samping itu, Perbup ini juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh elemen, baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dengan adanya kebijakan dan strategi tersebut, diharapkan Kabupaten Enrekang mampu mewujudkan pengelolaan sampah yang tidak hanya efektif dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Salah satu pendekatan penting dalam tahapan pengelolaan sampah adalah dengan menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Konsep ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan (*Reduce*), menggunakan kembali barang-barang yang masih layak pakai (*Reuse*), dan mendaur ulang material yang dapat diolah kembali (*Recycle*). Melalui penerapan konsep 3R, diharapkan dapat mengurangi beban sampah yang harus ditangani oleh Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. *Reduce* (mengurangi sampah) berarti mengurangi penggunaan barang atau bahan yang dapat menghasilkan sampah dan menjadi langkah awal dalam mencegah penimbunan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Menurut

Suryono dan Budiman dalam Malina et al., (2017) bahwa reduksi (mengurangi sampah) dapat dilakukan beberapa proses yaitu:

a. Reduksi volume sampah secara mekanik. Sampah dipadatkan menggunakan dump truck yang dilengkapi dengan alat khusus, sehingga volumenya menyusut secara signifikan dan kapasitas angkut dalam sekali perjalanan menjadi lebih optimal.
b. Reduksi volume sampah secara pembakaran. Metode pengolahan sampah yang ini bertujuan untuk mengurangi volume dan massa sampah secara signifikan dengan cara membakarnya pada suhu tinggi.

Reuse (menggunakan kembali) yaitu penggunaan kembali sampah atau barang bekas secara langsung tanpa harus melewati proses pengolahan atau daur ulang terlebih dahulu. Prinsip reuse diterapkan dengan upaya semaksimal mungkin memilih barang-barang yang dapat digunakan kembali dan menghindari penggunaan produk sekali pakai. Pendekatan ini bertujuan untuk memperpanjang masa guna suatu barang sebelum akhirnya dibuang sebagai sampah (Arisona, 2018). Contohnya, kertas berwarna dari majalah bekas dapat digunakan kembali sebagai pembungkus kado yang unik dan menarik, sementara botol bekas bisa dimanfaatkan sebagai wadah untuk menyimpan berbagai cairan seperti spiritus, minyak cat, dan lainnya. Menurut (Malina et al., 2017) pengelolaan sampah melalui pendekatan *reuse* dapat dilakukan melalui berbagai langkah atau metode, yaitu:

a. Gunakan wadah, kantong, atau barang lain yang dirancang untuk bisa dipakai berulang kali.
b. Manfaatkan kembali wadah atau kemasan yang sudah kosong, baik untuk tujuan semula maupun untuk keperluan lain yang sesuai.
c. Sampah yang telah dipilah diklasifikasikan berdasarkan jenis atau kategorinya.
d. Lakukan proses pembersihan terhadap sampah yang telah dikumpulkan.
e. Sampah yang sudah dipilah dan dibersihkan selanjutnya dapat digunakan kembali, baik untuk tujuan semula maupun untuk fungsi yang berbeda.

Recycle (Mendaur Ulang) adalah upaya pemanfaatan kembali atau proses mendaur ulang material yang sudah tidak terpakai (sampah) menjadi produk baru yang berguna setelah melalui tahapan pengolahan tertentu. Contohnya seperti mengolah potongan kain sisa menjadi selimut, kain lap, atau keset; mendaur ulang botol dan plastik bekas menjadi biji plastik yang kemudian dicetak kembali menjadi barang seperti ember, gantungan baju, atau pot tanaman; serta mengubah kertas bekas menjadi bubur kertas untuk kemudian dicetak ulang menjadi kertas baru dengan kualitas yang lebih rendah (Arisona, 2018). Mendaur ulang sampah bisa dilakukan oleh semua orang, setiap hari, di tempat mana pun, dan tidak memerlukan biaya (Malina et al., 2017).

Dengan menerapkan prinsip 3R dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya membantu mengurangi timbunan sampah, tetapi juga memberikan manfaat besar seperti menghemat sumber daya alam, menurunkan penggunaan energi, serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Selain itu, kebiasaan ini juga mendorong pola hidup yang lebih bijak dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

B. Defenisi Konsep

Untuk memahami bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Enrekang, peneliti menggunakan teori model dari Marilee S. Grindle. Model Grindle menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh derajat *implementability* dari isi kebijakan itu sendiri. Isi kebijakan mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan: Meliputi pihak-pihak di Kabupaten Enrekang yang terdampak oleh kebijakan pengelolaan sampah, seperti masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah.
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan: Berbagai manfaat yang diharapkan dari kebijakan tersebut, seperti peningkatan kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Enrekang.
3. Derajat perubahan yang diinginkan: Tingkat perubahan yang diharapkan dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah

terhadap kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat di Kabupaten Enrekang.

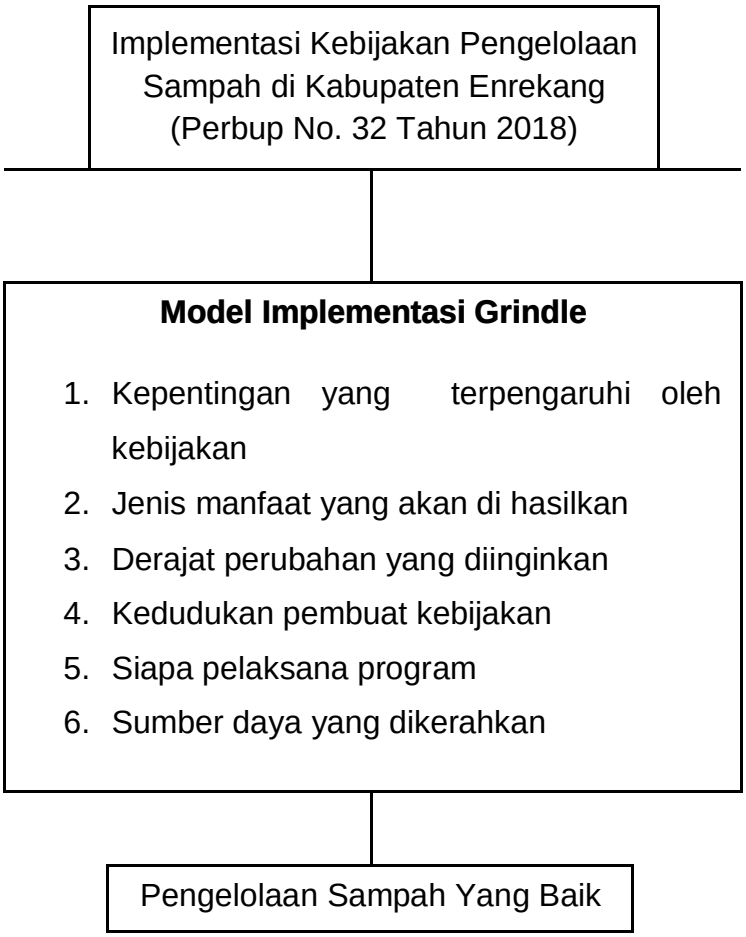
4. Kedudukan pembuatan kebijakan: Mengarah pada pihak-pihak yang terlibat dalam merumuskan kebijakan serta sejauh mana mereka memiliki otoritas dan pengaruh dalam proses tersebut
5. (Siapa) pelaksana program: Pihak-pihak yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan tersebut, terutama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang dan pelaksana teknis lainnya.
6. Sumber daya yang dikerahkan: Sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan sarana pendukung yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Enrekang untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah.

Model Grindle menegaskan bahwa isi kebijakan merupakan fondasi utama dalam proses implementasi dan menentukan sejauh mana kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif. Dengan menelaah aspek-aspek tersebut, peneliti dapat memahami bagaimana kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Enrekang dirancang dan seberapa besar potensi keberhasilannya.

Sehingga dalam penelitian ini fokus diarahkan pada isi kebijakan pengelolaan sampah yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 sebagai dasar untuk mengevaluasi proses implementasi kebijakan serta tantangan yang dihadapi.

C. Kerangka Penelitian

Gambar 5
Kerangka Pikir



Sumber : Marilee S. Grindle (Nugroho, 2009)